

Ideologi dan Politik Identitas: Kegagalan Partai Komunis Palestina dalam Mempersatukan Arab dan Yahudi

Faishal Sultan Bagaskara

Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail : faishal.bagas12@gmail.com

Abstract

The dynamics of the Palestinian struggle are also colored by the communist movement. This article discusses one of the periods of development of communism in Palestine, namely the founding of the Palestinian Communist Party (PCP) in 1923-1982. PCP was initially founded and dominated by Jewish immigrants from Russia. After officially joining the Communist International (Comintern), they received instructions to carry out Arabization within their party. This Arabization aims to enable the PCP to recruit Arabs and support the struggle of the Arab community, which is the majority in Palestine. This article analyzes the PCP's failure to unite Arabs and Jews, which was caused by differences in political interests. This research uses a narrative and empirical historical approach using critical historical methods (heuristics, verification, interpretation and historiography). The theory used in this research is the theory of ideology and identity politics. The findings of this research are that the emergence of identity politics between Arabs and Jews in the PKP has led to several internal (Arabization) and external policies (British White Paper 1939), which resulted in a dualism that thwarted their efforts to become a revolutionary party against British colonialism in Palestine.

Keywords: Arabization, British White Paper 1939, Palestine Communist Party, politics of identity.

Abstrak

Dinamika perjuangan bangsa Palestina juga diwarnai oleh gerakan berhaluan komunis. Artikel ini bertujuan untuk membahas salah satu periode perkembangan komunisme di Palestina, yaitu berdirinya Partai Komunis

Palestina (PKP) tahun 1923-1982. PKP pada awalnya didirikan dan didominasi oleh imigran Yahudi dari Rusia. Setelah resmi bergabung dengan Komunis Internasional (Komintern), mereka mendapat instruksi untuk melakukan Arabisasi di dalam partai mereka. Arabisasi ini bertujuan agar PKP dapat merekrut orang-orang Arab dan mendukung perjuangan komunitas Arab yang merupakan mayoritas di Palestina. Artikel ini menganalisis kegagalan PKP dalam menyatukan bangsa Arab dan Yahudi yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah naratif dan empiris dengan memanfaatkan metode sejarah kritis (heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ideologi dan politik identitas. Temuan dari penelitian ini adalah munculnya politik identitas antara Arab dan Yahudi dalam PKP telah menyebabkan beberapa kebijakan internal (Arabisasi) dan eksternal (*British White Paper 1939*), yang berujung pada dualisme yang menggagalkan upaya mereka untuk menjadi partai revolusioner melawan penjajahan Inggris di Palestina.

Kata kunci: Arabisasi, *British White Paper 1939*, Partai Komunis Palestina, politik identitas.

Pendahuluan

Gerakan komunis di Palestina muncul pasca Deklarasi Balfour 1917, dimana sebagian besar anggotanya berasal dari Yahudi Eropa Timur. Mereka adalah kelompok penentang Yahudi pengikut arus utama, yaitu pemikiran Zionisme Politik yang diusung oleh Theodor Herzl dalam Konferensi Zionis pertama di Basel tahun 1897. Gerakan komunis Palestina menjadikan Yishuvisme sebagai ideologi perlawanan terhadap Zionisme politik. Greenstein menyebutkan bahwa Yishuvisme merupakan sebuah strategi untuk meradikalisasi Yahudi imigran, sekaligus menunjukkan kepada bangsa Arab Palestina bahwa orang-orang Yahudi bisa menjadi sekutu dalam perjuangan bersama melawan Inggris (Greenstein, 2013). Yishuvisme sendiri merupakan sebuah ideologi yang masih dipengaruhi oleh paham sosialisme.

Joel Beinen mengutarakan bahwa Zionisme Politik adalah sebuah perwakilan dari gerakan kaum borjuis Yahudi yang berusaha menciptakan keuntungan hanya untuk diri mereka sendiri. Zionisme politik dan Inggris dipandang memiliki keterkaitan (Beinen, 1977). Karen Armstrong memaparkan bahwa Zionisme merupakan salah satu ideologi yang turut menyuarakan kapitalisme dan merupakan musuh bagi kelompok komunis (Armstrong, 2013).

Yahudi pengusung Yishuvisme adalah kelompok Zionis proletar yang memiliki keyakinan bahwa negara Yahudi hanya dapat diciptakan melalui perjuangan kelas pekerja Yahudi dengan menciptakan masyarakat Yahudi proletariat di pedesaan dan di perkotaan, yang mana hal ini berbeda dengan Zionisme Politik yang mengharapkan sokongan dari Inggris dalam pembentukan negara Yahudi.

Secara resmi Partai Komunis Palestina (PKP) berdiri tahun 1923. Steppenbacker mengutarakan bahwa sejak menjalin kerja sama dengan Moskow, PKP mendapatkan tugas awal untuk mengubah citra diri mereka dari sebuah partai politik yang secara eksklusif masih didominasi oleh orang Yahudi serta memegang paham Zionis sosialis dan proletar menjadi partai yang bersifat lebih inklusif dan regional dengan menonjolkan dominasi perjuangan pekerja Arab. Hal ini dilandaskan pada ketertarikan Komunis Internasional (Komintern) untuk menyebarkan pengaruh komunis di Palestina, namun mereka menolak untuk bersekutu dengan kelompok sosialis yang berorientasi Zionis (Steppenbacker, 2009).

Kemudian Budeiri memberikan pandangan bahwa sejak tahun 1929 hingga tahun 1934, PKP terus berupaya mengimplementasikan proses Arabisasi seperti yang telah diputuskan oleh Komintern dengan mendatangkan beberapa orang Arab ke Moskow diiringi dengan gelombang masuknya orang Arab ke dalam anggota Komite Sentral partai. Kemudian pada 1934, anggota PKP dari kalangan Arab yang baru saja kembali dari Moskow bernama Ridwan Al Hilou ditunjuk menjadi pemimpin Komite Sentral PKP. Pada masa awal kepemimpinannya, Ridwan Al Hilou menjamin akan mengimplementasikan Arabisasi di PKP. Pada tahun 1935 Al Hilou menyatakan bahwa kegagalan PKP dalam melakukan Arabisasi disebabkan oleh kuatnya pengaruh kepemimpinan PKP di masa awal yang didominasi oleh kelompok Yahudi yang masih memelihara paham Zionisme. Maka dari itu Ridwan al Hilou berpendapat bahwa hal inilah yang membuat sebagian anggota partai khususnya yang berasal dari orang Yahudi terus menentang instruksi Komintern dan dianggap sebagai upaya untuk menghalangi proses Arabisasi (Budeiri, 1977).

Pada masa kepemimpinan Al Hilou, PKP mengembangkan sebuah pandangan bahwa penindasan dan kolonialisasi kepada kelompok kecil secara masif merupakan pilar utama dari imperialisme dan borjuasi Yahudi. Pandangan Al Hilou tersebut memunculkan asumsi bahwa keberadaan kelompok Yahudi merupakan sumber dari terciptanya gerakan imperialisme dan borjuasi di Palestina. Atas pandangan ini, PKP berhasil meraih pandangan positif dari gerakan nasionalis Arab Palestina sebagai partai yang "berkarakter anti-imperialis secara obyektif." Kemudian PKP meningkatkan kerja sama dengan gerakan nasionalis Arab Palestina yang diikuti dengan proses Arabisasi secara terus menerus. Kemudian PKP bersama dengan semua partai nasionalis Arab

Palestina bersatu untuk mempersiapkan kampanye di seluruh negeri dalam melawan Zionisme dan penjajahan Inggris (Beinen, 1977).

Pada akhir tahun 1935, PKP kemudian membentuk serta membuka komunikasi dengan kelompok gerilyawan Arab yang tengah mempersiapkan aksi militer. Pergerakan perlawanan ini dimulai pada bulan April 1936, dalam perlawanan ini PKP beserta kelompok gerilyawan menjadikan orang Inggris dan Yahudi-Zionis sebagai sasarannya. Dalam aksi perlawanan ini, Komite Sentral PKP mengutarakan bahwa tugas utama anggota PKP dari kalangan Arab ialah secara aktif berpartisipasi dalam menghancurkan Zionisme dan imperialisme, sementara tugas anggota partai yang berasal dari kalangan Yahudi yaitu mendukungnya dengan cara memperlemah pemukiman Zionis dari dalam.

Selain itu anggota PKP dari kalangan Yahudi turut diperintahkan untuk melakukan teror untuk melawan kelompok Yahudi-Zionis. Perintah tersebut rupanya membangkitkan masalah dalam tubuh PKP. Beberapa orang Yahudi meninggalkan PKP karena mereka tidak bisa menerima sepenuhnya tugas ini. Berbeda dengan kalangan Arab yang tergabung dalam PKP tetap melanjutkan tugas ini hingga tahun 1938 (Beinen, 1977).

Kemudian pada tahun 1939 dalam rangka membendung gelombang kerusuhan yang terjadi di Palestina, Pemerintah Inggris membuat sebuah regulasi baru dengan mengeluarkan White Paper 1939. Peraturan baru ini dibentuk sebab Inggris tengah berhadapan dengan Pasukan NAZI Jerman di Mesir (Mansfield, 2003). White Paper 1939 merupakan kebijakan Inggris yang mencoba untuk membatasi masuknya imigran Yahudi ke Palestina serta pelarangan kepada mereka untuk membeli tanah di Palestina (Apter, 2008). Kebijakan ini menyulut api amarah orang Yahudi di Palestina dan khususnya yang tergabung di PKP. Orang Yahudi melalui beberapa gerakan paramiliternya pun melakukan aksi teror kepada Pemerintah Inggris di Palestina. Dalam merespons aksi teror ini, Al Hilou dan semua kalangan Arab di PKP mengancam peristiwa tersebut, namun kalangan Yahudi di PKP justru mendukungnya.

Kelahiran komunisme di Asia Barat umumnya memiliki kesamaan, antara lain untuk melawan kolonialisasi Inggris dan Prancis. Sementara itu eksistensi komunis di tengah entitas masyarakat Palestina memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan beberapa wilayah Asia Barat lainnya. Keunikannya terletak pada adanya peran orang Yahudi komunis yang mengharapkan adanya sinergitas antara orang Arab dan Yahudi untuk melawan kolonialisasi Inggris dan Zionisme.

Artikel ini akan membahas sejarah kemunculan komunisme di Palestina, dengan tujuan untuk mengelaborasi kegagalan PKP dalam mempersatukan bangsa

Arab dan Yahudi, dengan mengamati bagaimana ideologi komunis yang diusung PKP harus berbenturan dengan politik identitas yang diusung oleh masing-masing etnis dengan visi dan misi mereka yang berbeda. Kemudian kondisi juga diperparah dengan munculnya kebijakan dari Pemerintah Inggris yang semakin memperuncing disintegrasi di PKP dalam mencapai tujuan mereka sebagai partai yang revolusioner, yang mana dari beberapa poin yang akan penulis teliti dalam artikel ini masih sangat jarang sekali dikaji di Indonesia. Selain itu penelitian ini berusaha mengelaborasi dua penyebab utama kegagalan PKP berdasarkan perspektif teori ideologi dan politik identitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah naratif dan empiris. Sementara metode yang digunakan adalah metode sejarah kritis (heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi) yang penulis amati melalui studi literatur yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

Pada fase heuristik, penulis mengumpulkan berbagai data penelitian yang bersumber dari data primer terkait *British White Paper 1939*, naskah tertulisnya penulis temukan di situs *The Avalon Project Yale Law School*. Penulis juga menemukan data perihal adanya respons orang Arab dan orang Yahudi atas diterbitkannya *British White Paper 1939*, diantaranya seperti artikel yang ditulis oleh Chaim Weizmann berjudul *The Jewish Case Against the Palestine White Paper* yang bisa ditemukan pada website *Berman Jewish Policy Archive*. Untuk respons dari pihak Arab, dapat ditemukan pada artikel berjudul *Reply of Arab Higher Committee for Palestine to the White Paper issued by The British Government* yang ditulis oleh Rabi El Akher dalam website *African Middle Eastern Reading Room*.

Kemudian untuk data mengenai instruksi Arabisasi dari Komunis Internasional kepada PKP di tahun 1929, penulis temukan dalam situs *ML Review: Marxist-Leninist Analyses of History, Political Events and Culture*. Sementara untuk data-data pendukung terkait penelitian ini, penulis merujuk kepada sumber artikel, thesis, disertasi dan sumber bacaan dari website yang membahas mengenai Partai Komunis Palestina.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai referensi sekunder yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang sudah lebih dulu mapan, seperti buku dan artikel yang membahas komunisme di Palestina baik yang terbit sejak periode 1970-an hingga yang terbit sepuluh tahun terakhir.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori ideologi dari Ali Shariati dan politik identitas menurut Cressida Heyes. Ali Syariati mengutarakan, ideologi adalah suatu sistem kepercayaan yang menginterpretasikan kondisi sosial, rasionalitas dan orientasi kelas seseorang seperti sistem nilai, orde sosial, format individu ideal, hidup manusia, dan situasi dalam berbagai dimensinya (Shariati, 1997).

Cressida Heyes menjelaskan bahwa politik identitas memberikan tanda adanya aktivitas politik dan kemunculan teori yang didasarkan pada pengalaman atas sikap ketidakadilan anggota kelompok sosial tertentu. Selain itu, Heyes menambahkan bahwa bahaya politik identitas akan memberikan klaim identitas yang otentik bagi suatu kelompok. Kemudian identitas tersebut akan mendominasi, menginternalisasi, dan memperkuat hierarki yang sifatnya menindas kelompok lainnya (Heyes, 2012).

Sejarah Munculnya Pemikiran Komunisme di Palestina

Partai Komunis merupakan sebuah partai yang menganut serta menyebarkan ajaran komunisme. Sebuah partai komunis umumnya akan bernaung di bawah Komunis Internasional (Komintern) yang berpusat di Moskow. Komintern Moskow dapat menggerakkan, sekaligus mengontrol partai-partai komunis lokal di seluruh dunia. Gerakan Komunis Internasional menjadi salah satu kekuatan politik paling utama di abad ke-20 (Magnis, 2017).

Komintern merupakan periode ketiga perkembangan komunisme global. Awalnya, berbagai kelompok politik sosialis sayap kiri, komunis, dan anarkis serta serikat organisasi pekerja yang didasarkan kepada perjuangan kelas tergabung dalam “Internasional Pertama” yang dibentuk pada tahun 1864. Organisasi ini kemudian bubar akibat perbedaan visi sosialisme antara dua kubu, yaitu Marx dengan ide komunisme dan Bakunin dengan ide anarkismenya (*Chapter Five Conflicting Elements in The International*, 1868). Kemudian terbentuk “Internasional Kedua” yang merupakan pembentukan kembali dari Internasional Pertama tanpa mengikutsertakan kelompok anarkis pada tahun 1889 dan berakhir pada 1916 di saat Perang Dunia Pertama (*The Second International*, 1891).

Pada tahun 1919, terbentuklah “Internasional Ketiga” yang diorganisasikan oleh Partai Komunis Uni Soviet, yang kemudian disebut “Komunis Internasional” (Komintern). Pembentukan Internasional Ketiga ini merupakan suatu momentum bersejarah karena terbentuk setelah adanya perpecahan dalam gerakan buruh yang disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin oportunistis di Internasional Kedua (Lenin, 1920). Lenin dan kaum Bolshevik membentuk Internasional

Ketiga sebagai sebuah partai internasional kelas buruh dengan satu tugas historis, yaitu revolusi kaum sosialis di seluruh dunia (Sprague, 2011).

Uni Soviet pun menjadi pusat komando partai komunis sedunia, dimana partai-partai komunis menerima bantuan dan arahan dari Moskow. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Komintern, termasuk dengan kekuatan bersenjata, dalam melakukan penggulingan terhadap borjuasi internasional. Maka dari itu, Komintern menjadi titik sentral yang mengkoordinasikan kebijakan komunis di seluruh dunia (Suseno, 2013).

Munculnya komunisme di Palestina ditandai oleh dua situasi berbeda. Situasi pertama, ditandai dengan kondisi Palestina di saat terjadinya peristiwa Revolusi Bolshevik dan dibentuknya Mandat Inggris. Situasi kedua disebabkan adanya eksistensi dan perkembangan komunisme di kalangan pekerja Yahudi di Eropa (Halliday, 1978). Para pekerja Yahudi itu kemudian datang ke Palestina bersama gelombang imigrasi Yahudi yang mulai bergerak secara lebih sistematis dan intensif sejak tahun 1882 setelah menyeruaknya *Problema Yahudi* di Rusia (Saleh, 2002). Pemikiran komunisme di kalangan Yahudi ini antara lain dikembangkan oleh seorang Yahudi Rusia, Ber Borochov, dengan doktrinnya *Kaum Proletariat Zionis* yang menekankan kepada eksistensi kebebasan kaum proletariat Yahudi yang memiliki karakter Zionisme sebagai ekspresi gagasan dan melibatkan peran kelas pekerja Yahudi dalam mendirikan negara Israel. Borochov lebih jauh lagi mengungkapkan bahwa orang Yahudi harus mendirikan sebuah negara (Budeiri, 1977).

Pemikiran Borochov ini menjadi pedoman bagi kelompok-kelompok sosialis-Zionis yang bergabung membentuk partai *Poale Zion* atau Partai Buruh Sosialis Yahudi Zionis pada tahun 1906. Poale Zion adalah sebuah partai internasional yang mengorganisasikan pekerja Yahudi dengan tujuan mensejahterakan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Poale Zion memandang bahwa kemiskinan disebabkan oleh sistem kapitalisme, maka dari itu mereka mengambil langkah sosialisme. Mereka mengusulkan untuk menghapus kepemilikan pribadi dalam ranah produksi, agar tercipta kepemilikan bersama (Fineman, 1918).

Sargent mengungkapkan bahwa Poale Zion adalah sebuah organisasi internasional yang mengkombinasikan teori Marxis dengan program pengembangan negara Yahudi di Palestina (Sargent, 1980). Fineman turut mengatakan bahwa hal ini merupakan usaha Poale Zion dalam mengkombinasikan jalan sistem perekonomian mereka dan kesadaran nasionalisme Yahudi mereka. Poale Zion juga berupaya mendirikan negara Yahudi di Palestina dengan tujuan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja (Fineman, 1918). Hal ini tidak lepas dari sosok Ber Borochov yang sejak awal berusaha untuk mengembangkan teori Marxisme dan nasionalisme

Yahudi. Borochov menggunakan teori sosial-ekonomi Marx sebagai *model sistem produksi* (Yassour, 1986).

Borochov berargumen bahwa ciri-ciri masyarakat Yahudi ditandai dengan dua kekurangan, yang *pertama*, mereka tidak memiliki tempat tinggal, *kedua* tidak adanya kelas pekerja. Dari kedua ketidaksempurnaan ini pun diambil solusi dengan membentuk kelas pekerja Yahudi di “tanah bangsa Yahudi,” yaitu Palestina. Borochov mengatakan bahwa masyarakat pribumi Palestina “tidak memiliki budaya asli mereka sendiri” dan “tidak mampu mengobarkan semangat nasionalisme mereka.” Borochov juga menambahkan bahwa orang Palestina bisa dengan mudah mengadopsi berbagai macam budaya dari luar ke wilayah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Zionis berusaha mengaburkan fakta bahwa penduduk asli Palestina adalah bangsa Arab (Halliday, 1978).

Dalam pandangan mereka, orang Yahudi di berbagai negara telah tercerai-berai, maka dari itu Poale Zion muncul di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang banyak terdapat komunitas-komunitas Yahudi, seperti di Rusia, Austria, Eropa Barat, Argentina, dan Amerika Serikat untuk menyatukan seluruh orang Yahudi yang ada di berbagai negara tersebut (Fineman, 1918).

Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, terdapat beberapa anggota Poale Zion yang bergabung dengan “Internasional Ketiga”. Selama periode ini mereka mengirimkan kontingennya ke Palestina sebagai pekerja. Kemudian mereka muncul sebagai gerakan ideologis dengan sikap yang kuat serta menjaga komitmen untuk hidup menjadi pekerja di wilayah yang mereka anggap terbelakang seperti Palestina. Hal ini menjadikan mereka sebagai sebuah institusi yang memberikan pengaruh penting dalam proses meningkatnya komunitas Yahudi di Palestina (Halpern & Reinharz, 1988).

Poale Zion memiliki wacana agar para anggotanya yang bermukim di pemukiman-pemukiman Yahudi di Palestina kemudian menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi baru mereka serta mempersiapkan sebaik-baiknya kelompok Yahudi yang lebih besar lagi untuk kehidupan baru mereka di Palestina. Dukungan ini berasal dari para imigran Yahudi yang datang ke Palestina (Fineman, 1918).

Para anggota Poale Zion ingin mendirikan negara yang menjadi masa depan bagi negara sosialis Yahudi, serta mendeklarasikan diri mereka sebagai partai yang menciptakan kelas pekerja di Palestina. Kemudian momentum Revolusi Rusia menjadi sebuah problem baru bagi Poale Zion, dimana banyak para anggotanya menunjukkan sikap pro dan anti terhadap komunis. Perpecahan ini terlihat dalam kongres Poale Zion yang berlangsung di Vienna pada bulan Juli-Agustus di tahun 1920, dimana barisan

kelompok Yahudi yang berdomisili di Palestina ini lebih memilih berafiliasi dengan Komintern.

Dalam sejarah perkembangan gerakan kaum pekerja Yahudi di Palestina, tercatat bahwa Histadrut memiliki peran yang sangat aktif. Histadrut merupakan sebuah organisasi yang menjadi pusat dari Serikat Pekerja Nasional Bangsa Israel yang mewakili mayoritas serikat pekerja Yahudi di Palestina. Histadrut didirikan di Haifa pada bulan Desember 1920. Histadrut dengan cepat memberi pengaruh yang kuat terhadap komunitas Yahudi di Palestina. Histadrut juga merupakan sebuah organisasi yang berfungsi untuk menghimpun beberapa kelompok serikat pekerja di Palestina yang masih terhubung dengan Poale Zion seperti Ahdut HaAvoda, Hapoel Hatzair, dan Mifleget Poalim Sozialist (MPS) (Heller, 2003).

Ahdut HaAvoda ialah sebuah partai buruh yang didirikan di Palestina pada bulan Maret 1919. Partai ini dipimpin oleh David Ben Gurion yang merupakan kelompok sayap kanan dari Poale Zion yang masih memegang ideologi sosialis, namun masih bersifat moderat. Hal ini menunjukkan bahwa Ahdut HaAvoda masih memegang prinsip-prinsip Zionisme. Ahdut HaAvoda merupakan partai buruh yang memiliki peran penting dalam mendirikan sebuah kelompok gerakan paramiliter Yahudi, yaitu Haganah (Beinen, 1977). Haganah pada peristiwa Nakba 1948 menjadi salah satu milisi yang melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang Palestina (Hatuqa, 2023). Histadrut memiliki keterikatan dengan Poale Zion, sebab Ben Gurion pernah menjadi sekretaris jenderal Histadrut dan Poale Zion berperan penting menyuarakan propaganda Histadrut di Eropa dan Amerika (Fraser, 2014).

Kemudian terdapat kelompok sayap kiri yang menolak untuk memegang prinsip Zionisme lalu kemudian memisahkan diri dengan membentuk organisasi baru yang bernama *Mifleget Poalim Sozialist* (MPS) atau partai pekerja sosialis (Budeiri, 1977). MPS dibentuk pada bulan Oktober tahun 1919 setelah memisahkan diri dari cabang Poale Zion Palestina. MPS menilai bahwa gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina merupakan perusakan terhadap populasi Arab dalam persaingan mencari penghasilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Rubenstein, 2019).

Namun perjuangan MPS hanya berumur dua tahun. Ide revolusi sosialis mereka tertanam di beberapa anggota mereka untuk bekerja sama dengan orang-orang Arab. Wacana MPS ini dianggap sebagai suatu keanehan di kalangan komunitas Yahudi lainnya, karena ide revolusi MPS ini dinilai sudah terlalu jauh dari konsep sosialis Zionis (Steppenbacker, 2009).

Maka dari itu, kita dapat mengelaborasi bahwa kelompok Zionis di Palestina terdapat dua haluan yang berbeda. Haluan yang pertama adalah anggota dari Aliyah

kedua yang disebut sebagai Zionis buruh, yaitu mereka yang peka terhadap kebutuhan petani lokal Arab Palestina yang mereka anggap berada pada tingkat yang lebih rendah, masih dalam tahap perkembangan dimana mereka mencoba untuk membantu petani lokal Arab dengan struktur ekonomi baru mereka dengan harapan mampu saling bersinergi untuk kepentingan Yahudi dan Arab dalam mengelola tanah secara keseluruhan.

Haluan kedua, terdapat kelompok Zionis yang berusaha untuk menghilangkan orang Arab Palestina dari diskursus mereka dan menganggap orang Arab tidak lagi penting sebagai pekerja. Kelompok ini mendefinisikan proyek Yahudi yang lebih komprehensif yang akan membangun masyarakat Yahudi dari awal. Beberapa ahli membandingkan wacana mereka ini dengan pola pikir penjajah pemukim (*settler colonial*) Amerika (orang Eropa di koloni Amerika). Kelompok Zionis ini membayangkan menciptakan “kota di atas bukit” yang akan terbentuk tanpa keterlibatan langsung dengan pribumi. Pemikiran ini, meski berakar pada nilai-nilai progresif, nantinya akan melahirkan tantangan dan konflik baru (Halperin, 2015).

Terbentuknya Partai Komunis Palestina

Terdapat salah satu kelompok radikal yang dipimpin oleh Joseph Berger-Barzilai yang memilih untuk memisahkan diri dari MPS kemudian membentuk Partai Komunis Palestina (PKP) pada tahun 1923. Di awal terbentuknya partai ini sempat goyah akibat adanya usaha untuk kembali melakukan rekonsiliasi dengan kelompok Sosialis-Zionis (Kessler, 2014). PKP menegaskan akan mengambil sikap yang radikal dalam perjuangan mereka, dimana Joseph Berger Barzilai menjadi konseptor wacana pemisahan diri PKP dari naungan Zionisme, diikuti dengan mendukung pergerakan nasional Arab, serta berjuang melawan imperialisme Inggris. Joseph Berger-Barzilai (nama asli Isaac Zeliarnik), awalnya merupakan seorang Zionis, namun kemudian ia beralih menjadi seorang komunis anti-Zionis. Pada tahun 1924 ia ditugaskan ke Lebanon untuk mendirikan partai komunis di sana. Sekembalinya ke Palestina, ia ditangkap oleh Inggris karena partisipasinya dalam partai komunis yang pada waktu itu dianggap ilegal, namun pada akhirnya ia tidak dipenjara (Kessler, 2014).

Barzilai merupakan salah satu tokoh yang merancang program anti-Zionis di PKP dan mendukung secara penuh pergerakan nasionalis Arab. Barzilai menolak adanya rekonsiliasi dengan kelompok Sosialis-Zionis dengan alasan kekhawatiran jika PKP akan berubah menjadi sebuah partai yang didominasi oleh ideologi Zionis, seperti yang diterapkan oleh kelompok buruh Zionisme yang dipimpin David Ben Gurion yaitu Ahdut HaAvoda (Kessler, 2014). Selain itu muncul pula anggapan bahwa Zionisme

adalah sebuah gerakan ideologi yang diciptakan oleh sebagian kecil kelompok Yahudi intelektual borjuis sesat yang mana mereka adalah bagian dari alat kolonialisasi Inggris. Serangan Barzilai kepada Mandat Inggris dan Zionis di Palestina ia tuangkan melalui sebuah buku berjudul *The Mufti Matityahu and Great Peasants Uprising Two Thousand Years Ago* (Locker-Biletzki, 2015)

Masih di tahun 1923, PKP mengirimkan delegasinya yang bernama Wolf Auerbach untuk melakukan komunikasi dengan Komintern agar PKP bisa menjadi anggota dari Komintern. Berkat upayanya ini PKP akhirnya diakui sebagai anggota Komintern pada bulan Maret 1924, dengan syarat mentransformasikan organisasi Pekerja Yahudi menjadi sebuah organisasi partai yang betul-betul bersifat *teritorial* serta mendukung perlawanan Arab terhadap Zionis dan Inggris. Hal ini merupakan kewajiban bagi partai komunis di belahan dunia lain, semua aturan partai komunis dibentuk oleh gerakan komunis internasional serta memperjuangkan kepemimpinan politik di Rusia (Greenstein, 2009).

Maka dari itu Komintern memberikan mandat kepada PKP untuk tidak lagi berhubungan dengan Poale Zion, sebab mereka pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang anti-komunis meskipun mereka dengan lantang menyebut diri mereka sosialis (Kessler, 2014). Berangkat dari persoalan ini Barzilai pun pada akhirnya turut mengungkapkan bahwa gerakan Sosialis-Zionis dianggap memiliki peran penting dalam pendudukan Zionis di Palestina yang akan terus memperkuat cengkraman kolonialisasi Inggris di Palestina (Perlmutter, 1969). Meskipun para aktivis PKP ini awalnya dibawa ke Palestina oleh Organisasi Zionis, mereka tetap mempertahankan prinsip mereka sebagai sebuah partai yang menanamkan kekuatan revolusioner dalam mendukung perjuangan orang-orang Arab di Palestina (Budeiri, 1977).

Maka dari itu, pada bulan Juli 1924, perwakilan Komintern untuk wilayah timur, Karl Radek memberikan perintah kepada PKP untuk segera melakukan *Teritorialisasi*, yaitu upaya dalam mengubah diri mereka menjadi partai pekerja Arab dan kamerad Yahudi yang terteritorialisasikan. Maksudnya adalah mereka yang tumbuh dalam kondisi wilayah Palestina harus beradaptasi serta mengenal bahasa dan adat istiadat Arab. Perintah ini merupakan tugas yang sangat esensial, sebab jika PKP tetap didominasi oleh Yahudi, maka secara objektif mereka akan dikategorikan sebagai partai kolonialis. Sedangkan jika para anggota partai dari kalangan Yahudi berhasil melakukan teritorialisasi dan berhasil merekrut banyak orang Arab, maka eksistensi PKP dapat dibenarkan sebagai sebuah partai komunis di Palestina (Franzen, 2007). Akibat keputusan ini, ke depannya PKP harus menghapus segala hal yang terkait dengan ideologi zionisme, termasuk *Yishuvisme*.

Desakan ini terus disampaikan oleh Karl Radek sebab pengaruh orang Yahudi di PKP masih terlalu dominan, dan dikhawatirkan akan menghambat visi PKP yang secara ideologis sangat berseberangan dengan Zionisme. Komintern juga terus menekankan supaya PKP mampu mencari dukungan dari kalangan kelas pekerja Arab di Palestina (Budeiri, 1977). Namun sayangnya di tahun 1926, Komintern merasa tidak puas dengan hasil kerja PKP karena belum berhasil melibatkan dan merekrut orang-orang Arab dan PKP masih lebih didominasi oleh orang-orang Yahudi saja. Komintern pun menekankan kepada PKP untuk terus meningkatkan aktivitas partai di kalangan orang-orang Arab dengan perintah untuk menyebarkan dan memperkuat ikatan dengan Pergerakan Nasional Arab. Upaya ini pun akhirnya dapat dicapai tanpa menurunkan aktivitas partai di lingkungan orang-orang Yahudi (Budeiri, 1977).

Pada tahun 1930, Komunis Internasional menyampaikan surat terbuka kepada PKP dan menyampaikan bahwa Zionisme adalah ekspresi dari upaya eksploitasi dan kekuatan penindasan dari kalangan borjuasi Yahudi yang memanfaatkan kelompok minoritas nasional Yahudi di Eropa Timur dengan tujuan imperialisme dalam menjamin dominasi mereka (Franzen, 2007).

Jika ditarik ke belakang, PKP merupakan sebuah partai yang menganut ideologi *Yishuvisme*. *Yishuvisme* merupakan sebuah doktrin yang dibuat oleh PKP supaya orang-orang Arab tidak memusuhi orang Yahudi di Palestina. *Yishuv* (pemukiman) merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada komunitas pemukiman Yahudi yang ada di Palestina. Franzen mengungkapkan bahwa *Yishuvisme* ialah sebuah teori yang dikembangkan untuk menyesuaikan kelompok Komunis yang memiliki asas anti-Zionisme dengan kondisi lokal atau mendukung orang-orang lokal serta menegaskan bahwa PKP menjunjung tinggi asas *Yishuvisme* bukan kepada Zionisme. Secara ideologis *Yishuvisme* adalah ideologi yang masih mengakar atau masih dipengaruhi kepada pemikiran Borochoy yang menekankan bahwa *Yishuvisme* harus berperan dalam bidang sosial dan ekonomi secara progresif dan mendukung terciptanya kaum Proletariat Yahudi di Palestina sebagai garda depan sosialis (Franzen, 2007).

Dengan demikian *Yishuvisme* merupakan sebuah ideologi yang menolak Zionisme politik yang digagas oleh Theodor Herzl sebagai sebuah gerakan politik maupun sebagai sebuah ideologi, PKP berharap *Yishuvisme* bisa menjadi alternatif sebagai pengganti Zionisme. Meskipun *Yishuvisme* masih menjadi bagian dari ideologi Zionisme dan mendukung program imigrasi orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina, semata-mata strategi ini hanya bertujuan untuk meradikalisasi imigran Yahudi yang bermukim di Palestina, serta mendorong mereka untuk keluar dari Zionisme dan memperlihatkan kepada orang Arab Palestina bahwa orang Yahudi bisa

menjadi sekutu dalam upaya berjuang melawan kolonialisasi Inggris di Palestina (Franzen, 2007).

Akan tetapi ideologi Yishuvisme yang dijadikan landasan PKP ini bertentangan dengan garis komando yang diwacanakan oleh Komintern kepada PKP. Hal ini dikarenakan Komintern menginginkan agar wacana mereka yang dipegang oleh PKP sehingga PKP dapat menjadi sebuah partai yang didominasi orang Arab melalui program Arabisasi. Karena itu, PKP pun harus menghapus Yishuvisme dari ideologi mereka sebab ideologi tersebut masih terdapat paham Zionisme (Greenstein, 2013). Faktor lain dihapusnya Yishuvisme sebagai sebuah ideologi di PKP disebabkan oleh sifat eksklusifnya. Ide-ide Yishuvisme yang dipaparkan hanya disampaikan dalam bahasa Rusia atau Yiddish saja, tentu hal ini tidak mungkin bisa diterima oleh mayoritas Arab. Seperti yang sudah diungkapkan di awal pembahasan bahwa Yishuvisme pada awalnya dikembangkan secara eksklusif oleh para Yahudi yang berasal dari Eropa Timur (Franzen, 2007). Komunis Yahudi dianggap tidak memahami realitas penjajahan di Palestina, bahwa sebagian besar Yishuv merupakan bagian dari Zionis. Mereka dinilai tidak dapat melihat dengan jelas nasionalisme Palestina dan karakter Zionisme (Locker-Biletzki, 2018).

Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ideologi Zionisme, terdapat beberapa bagian metode pergerakan yang menjadi landasan untuk membentuk negara Yahudi di Palestina. Umumnya masyarakat dunia hanya mengetahui bahwa ide Zionisme hanya diprakarsai oleh Theodor Herzl dengan ide Zionisme politik. Namun nyatanya terdapat beberapa ideologi yang masih terkait dengan Zionisme, salah satunya adalah Yishuvisme. Ideologi ini memandang bahwa negara Yahudi bisa dibentuk melalui perjuangan kelas pekerja dengan cara meradikalisasi pemukim Yahudi di Palestina. Selain itu Yishuvisme ini juga ingin menunjukkan kepada Arab Palestina bahwa orang Yahudi bisa menjadi sekutu yang baik dalam melawan kolonialisasi Inggris dan Zionisme politik. Namun kemudian, sesuai arahan Komintern, PKP menghapus Yishuvisme dari ideologi partai

Proses Arabisasi PKP

Arabisasi sendiri lebih ditekankan sebagai sebuah kebijakan tunggal dari Komintern kepada PKP untuk melakukan pribumisasi agar PKP menjadi partai yang secara penuh mendukung perjuangan orang Arab (Kirasirova, 2016). Maka dari itu tugas pertama PKP setelah bergabung dengan Komintern ialah mengkampanyekan Arabisasi dengan cara mengintensifkan aktivitas di antara masyarakat Arab yang berasal dari kaum proletar (Greenstein, 2011).

Namun sayangnya, PKP dinilai gagal dalam mengaplikasikan proses Arabisasi, seperti yang diuraikan oleh ECCI (*Executive Comitte Communist International*) atau Komite Eksekutif Komintern, bahwa PKP lebih mengutamakan kelompok-kelompok Yahudi dan tidak solid dalam mengadakan komunikasi dengan kelompok-kelompok Arab maupun petani-petani Arab. PKP juga dinilai gagal oleh ECCI untuk menyatukan orang Arab dengan slogan-slogan mereka untuk membentuk pasukan pekerja Arab dan Yahudi, mempersenjatai mereka dan membentuk sebuah kelompok demonstrasi gabungan antara pekerja Arab dan Yahudi. Melihat kegagalan ini Komintern memerintahkan PKP untuk segera mendirikan serikat buruh Arab dan Yahudi serta memperluas gerakan ini, partai harus aktif dalam melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok petani untuk menyusun program agraria (Secretariat, 1929). Selain itu Komintern juga menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi di Palestina sebagai kelompok yang kontra-revolusioner karena tidak menjalankan instruksi secara menyeluruh dan masih mengedepankan tujuan pribadi mereka di Palestina (Budeiri, 2012).

Kemudian Komintern menginstruksikan PKP untuk segera menjalin kerjasama dengan Gerakan Aliansi Nasionalisme Arab supaya tujuan mereka dalam mendukung perjuangan orang Arab yang revolusioner bisa segera terealisasi. Pada Kongres keenam Komintern pada tahun 1928, ECCI dan PKP meramalkan akan terjadi Revolusi Agraria di Palestina. ECCI meminta mereka untuk mempersiapkan diri dalam mengambil peran penting di pemberontakan yang akan terjadi tersebut sebagai pembawa revolusi anti-imperialis di kalangan orang-orang Arab. ECCI lalu mengedepankan sebuah tuntutan baru kepada PKP yaitu untuk disegerakannya proses Arabisasi yang dilatar belakangi oleh kekuatan radikalisme massa orang Arab, serta menambah kepercayaan orang Arab kepada PKP dalam perjuangan membentuk pemerintahan yang disokong oleh kelompok pekerja dan petani di Palestina (Budeiri, 1977). Pergerakan Nasional Arab ini merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa partai yang menjunjung tinggi nasionalisme Arab, di mana pada awal berdirinya organisasi ini sudah berposisi dengan Daulah Turki Utsmani yang mereka anggap sebagai imperialis (Ayyad, 1999).

PKP terus berupaya untuk mengimplementasikan perintah dari Komintern, untuk segera bekerja sama dengan kelompok anti imperialis lokal yang juga memiliki kesamaan visi dengan Nasional Arab Palestina. Organisasi ini juga memiliki visi melawan imperialisme serta menentang gelombang imigrasi dan pemukiman Zionis di Palestina. Pada awalnya PKP mendukung mereka, namun pada fase perjuangannya, mereka berbalik mengkritik karena pendiri dan pemimpin Nasional Arab Palestina, yaitu Muhammad Amin Al Husaini yang sempat mereka tuduh bekerja sama dengan

Inggris. Tak hanya itu, saat terjadi insiden tembok ratapan yang terjadi pada bulan Agustus 1929 yang berujung dengan meningkatnya perselisihan antara Muslim dan Yahudi, Al Husaini dan Dewan Tinggi Muslim (*Supreme Moslem Council*) mengalihkan isu perjuangan anti-imperialis menjadi anti-Yahudi di kalangan masyarakat Arab. Hal ini pun membuat PKP enggan bekerja sama dengan mereka (Beinen, 1977). Penolakan misi ini disuarakan oleh anggota mereka yang berasal dari kalangan Yahudi.

Kegagalan PKP dalam mengambil langkah yang tepat di pemberontakan bulan Agustus tahun 1929 tersebut, dianggap sebagai aksi penolakan dalam mematuhi instruksi dari ECCI. Akibatnya, ECCI memutuskan untuk mengembangkan PKP menjadi sebuah partai yang *terarabkan* sebagai langkah aktif untuk memastikan bahwa perubahan ini sesuai dengan kehendak Komintern (Budeiri, 1977).

Kemudian dalam rapat Komite Sentral PKP pada bulan Mei 1930, mereka menyatakan akan meningkatkan keanggotaan orang Arab, mendirikan cabang partai orang-orang Arab, dan memilih anggota yang berasal dari orang Arab untuk memimpin partai, namun hal ini semata-mata hanya untuk menarik dukungan dari Komintern. Dalam rapat ini, Komite sentral menyuarakan slogan *Arabisasi plus Bolshivisasi* namun sayangnya rumusan ini ditolak oleh kelompok Yahudi di PKP yang secara terang-terangan melakukan demonstrasi. Mereka enggan jika partai dipimpin oleh anggota yang berasal dari orang Arab (Budeiri, 1977). Dengan demikian, terdapat dua kecenderungan haluan di dalam PKP, yaitu *Arabisasi* dimana kelompok ini menjalankan semangat anti-imperialis, yang mana kelompok ini merepresentasikan orang Arab. Sementara kelompok lainnya ialah yang memegang doktrin *Yishuvisme* yang mendukung komunitas Yahudi di Palestina (Budeiri, 1977).

Berdasarkan data intelejen Inggris, bergabungnya orang-orang Arab ke dalam PKP terjadi pada tahun 1924, kemudian terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Orang-orang Arab yang telah bergabung tersebut kemudian diberangkatkan ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan politik. Mayoritas orang Arab yang tertarik untuk bergabung dengan PKP ialah mereka yang beragama Kristen Ortodoks. Mereka memiliki simpati terhadap Moskow dikarenakan mereka adalah jemaat dari Gereja Ortodoks Rusia (Halliday, 1978).

Hubungan antara Kristen Ortodoks Arab Palestina dan Rusia sudah terjalin sejak abad 1882 yang ditandai dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan serta program beasiswa bagi pelajar Kristen Ortodoks Palestina ke Rusia. Beberapa pelajar yang kembali dari Rusia ini pada awal 1920-an mulai menyebarkan paham komunis di Palestina serta membangun sikap anti imperialis dan anti-Zionis (Mack, 2015).

Budeiri memaparkan bahwa pergerakan ataupun paham komunis yang digiatkan oleh PKP ini hanya sedikit mendapatkan atensi dari umat Islam Palestina pada waktu itu. Di antara alasan mengapa mereka tidak bergabung dalam PKP karena Islam telah berbicara mengenai keadilan sosial dan semangat melawan penindasan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad (Budeiri, 1977). Dengan kata lain, bagi mereka, untuk melawan imperialisme dan kolonialisme tidak mesti bergabung dengan partai komunis, sebab pondasi ajaran Islam sudah memiliki ajaran untuk menegakkan keadilan sosial serta melawan penindasan.

Fakta yang menunjukkan keseriusan PKP dalam merekrut orang-orang Arab ialah di saat mereka turut memperjuangkan nasib orang Arab Palestina di Lembah Jezreel pada saat wilayah itu hampir dibeli keseluruhannya oleh Jewish National Fund (JNF) pada bulan November 1924 (Beinen, 1977). JNF adalah organisasi Zionis yang berdiri pada Kongres Zionis ke-5 di Basel tahun 1901. JNF berperan dalam sektor perekonomian Zionis. Mereka membeli tanah di Palestina untuk dikembangkan menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian bagi orang Yahudi (Lehn, 1974).

Para petani Palestina yang tinggal di lembah Jezreel kemudian diusir dari lahan mereka. Setelah orang-orang Arab terusir, kemudian orang-orang Zionis dapat membangun pemukiman di Lembah Jezreel. Melihat hal ini, PKP secara militan berjuang mempertahankan hak petani Palestina tersebut untuk menjaga tempat tinggal dan lahan pertanian mereka serta mendorong mereka untuk melawan Zionis. Sementara itu di waktu yang sama PKP turut mendesak pekerja Yahudi untuk tidak membangun pemukiman di Afula (Beinen, 1977).

Di tahun 1934 salah satu anggota PKP Ridwan al-Hilou (Musa) memimpin komite sentral PKP. Ia merupakan seorang pelajar Arab yang mengenyam pendidikan di Moskow. Ia mengklaim bahwa kegagalan PKP dalam merekrut pekerja Arab disebabkan karena pengaruh kepemimpinan lama yang masih didominasi oleh orang Yahudi. Selain itu, dia juga mengembangkan sebuah pandangan bahwa komunitas Yahudi di Palestina diibaratkan seperti wujud penindasan dan kolonialisasi dalam skala kecil. Melalui pandangan ini, Ridwan al Hilou serta PKP meraih simpati serta pandangan positif dari kalangan pekerja Arab dan pandangan ini pun turut didukung oleh Komintern (Beinen, 1977).

British White Paper 1939

Keretakan semakin terlihat di PKP di saat pemerintah Inggris membuat kebijakan baru, yaitu White Paper 1939, yang berisi pembatasan masuknya imigran Yahudi ke Palestina hingga tahun 1944. Penambahan imigran dapat dilakukan dengan

meminta persetujuan orang Arab. Selain itu Inggris juga turut melakukan pelarangan kepada orang Yahudi untuk membeli tanah di Palestina. Dalam kebijakan tersebut Inggris turut mengusulkan untuk membentuk sebuah Negara, di mana orang Arab dan Yahudi berbagi kekuasaan (Apter, 2008). Kebijakan ini dilakukan untuk membendung pemberontakan bangsa Arab Palestina terhadap Inggris, karena di saat yang bersamaan Inggris tengah berperang melawan tentara Nazi Jerman di Mesir (Mansfield, 2003).

Salah satu isi White Paper 1939 mengenai imigrasi disebutkan bahwa komunitas Yahudi dapat meningkatkan jumlah migrasinya, namun tidak boleh dengan jumlah besar. Hal ini dilakukan agar para pendatang itu tidak menjadi beban bagi rakyat Palestina. Dalam mandat tersebut juga tidak ditemukan pernyataan mengenai kebijakan Inggris untuk melanjutkan pembentukan *Jewish National Home* (janji Inggris dalam Deklarasi Balfour). Hal ini mengakomodasi ketakutan dari orang-orang Arab bahwa migrasi kaum Yahudi akan membuat mereka mendominasi wilayah Palestina dan akan mengancam perdamaian dan kemakmuran di Palestina (The Avalon Project, 2008). Selain itu, White Paper juga menempatkan Yahudi di Palestina sebagai kelompok minoritas permanen serta melarang pembangunan pemukiman Yahudi di beberapa wilayah Palestina (Weizmann, 1939).

Orang Arab sangat menyambut baik keputusan dari pemerintah Inggris mengenai persoalan pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina. Sikap orang-orang Arab terhadap persoalan imigrasi Yahudi tetap tidak akan pernah berubah dan akan selalu menuntut penghentian secara total imigrasi tersebut. Orang-orang Arab sendiri sudah melakukan pertimbangan untuk mengambil langkah damai, namun jika Pemerintah Inggris bersikeras merampas hak-hak orang Arab dan orang Yahudi bersikeras dengan misi suci mereka untuk merebut tanah Palestina, maka orang-orang Arab memutuskan untuk kembali melakukan langkah-langkah pemberontakan kembali. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya sikap yang muncul secara alami bagi masyarakat yang ingin mempertahankan eksistensi negara dan nasionalisme mereka (Akher, 1939).

Chaim Weizmann selaku pimpinan agensi Yahudi di Palestina melakukan protes kepada pemerintah Inggris atas kebijakan White Paper ini. Bagi mereka, migrasi Yahudi merupakan sebuah hal yang sangat penting dan perkembangan *Jewish National Home* tidak hanya berbicara peningkatan jumlah populasi, tetapi juga perluasan wilayah, terutama perihal pemukiman dan lahan pertanian (Weizmann, 1939). Dikeluarkannya White Paper 1939 membuat orang-orang Yahudi menganggap bahwa Inggris mulai tidak konsisten dengan wacananya untuk membentuk *The Jewish National Home*. Maka dari itu orang Yahudi melakukan tekanan kepada Inggris dengan aksi-aksi terorisme yang didalangi oleh gerakan paramiliter Yahudi (Guelke, 2003). Sentimen

anti-Inggris yang disuarakan oleh paramiliter Yahudi di Palestina yang bernama *Irgun Zvai Leumi*. Irgun mulai melakukan teror dengan menyerang berbagai macam instalasi milik Inggris di Palestina. Sebenarnya, sejak 1937 pun Irgun telah aktif melakukan serangkaian penyerangan dan pegeboman di pusat-pusat populasi Arab. Aksi teror Irgun melawan Inggris dimulai enam hari pasca dirilisnya White Paper 1939 (DeBoard, 2013).

Selama periode pertengahan tahun 1930 sampai tahun 1939, di saat gelombang anti-Zionisme yang terus meluas, PKP turut aktif dalam aksi pemberontakan (aksi teror) terhadap Inggris. Pada periode ini pula keretakan serta dualisme PKP mulai terlihat dimana orang-orang Yahudi merasa sudah terpinggirkan dari partai. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kelompok Yahudi yang membentuk garis politik sendiri dan keluarnya beberapa anggota Yahudi dari PKP (Beinen, 1977). Komite Sentral PKP dan mayoritas orang Arab mengutuk pemberontakan ini, karena dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan terjadinya peperangan.

Para anggota PKP dari cabang Haifa dan Tel Aviv yang didominasi oleh orang-orang Yahudi mendukung pemberontakan terhadap Inggris sehingga mereka pun diberhentikan oleh Komite Sentral PKP. Shmuel Mikunis adalah salah satu tokoh PKP yang dianggap sebagai tokoh penting Yahudi di PKP, dicabut keanggotaannya dari Komite Sentral PKP karena mendukung pemberontakan yang dilakukan orang Yahudi terhadap Inggris. Merespon hal ini, Shmuel Mikunis dan tokoh Yahudi lainnya turut membentuk kelompok-kelompok oposisi dan menyatakan diri sebagai 'Partai Komunis yang resmi' pada bulan Mei 1944 (Beinen, 1977).

Dalam sebuah laporan Central Intelligence Group yang diterbitkan tahun 1946, disebutkan bahwa penetrasi Uni Soviet di Palestina amat berpengaruh. Melalui PKP, Uni Soviet mendorong adanya perlawanan terhadap Inggris. Laporan ini menunjukkan bahwa PKP tidak memiliki satu titik kepemimpinan atau tidak memiliki satu komando seperti partai-partai komunis yang lain (CIA, 1947). Martin Ebon mengungkapkan bahwa komunisme di Palestina dianggap sebagai upaya perlawanan terhadap dominasi Inggris di Palestina dan PKP menjadi alat dari Uni Soviet untuk mencari dukungan di Palestina. Hal ini dalam konteks semakin menguatnya persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur (Ebon, 1948).

Pada tahun 1943 PKP terpecah menjadi dua, dimana kelompok sayap kiri Arab membentuk National Liberation League (NLL), Sementara dari kelompok Yahudi membentuk Hebrew Communist Party yang memilih untuk kembali berhubungan baik dengan Zionisme. Perpecahan ini terjadi akibat perbedaan refleksi pergerakan nasional

mereka. NLL lebih menekankan pergerakan nasional bangsa Arab Palestina yang berjuang meraih kemerdekaan Palestina (Greenstein, 2013).

NLL memutuskan untuk melakukan afiliasi kembali dengan komunis Yahudi yaitu MAKI (*HaMiflega HaKomunistit Ha Yisraelit*) pada tahun 1948 dimana mereka sepakat untuk kembali membentuk susunan partai multi-nasional dimana mereka mengusung internasionalisme Marx-Leninisme. Gerakan ini berjalan dari tahun 1948 hingga 1965, dimana mereka mengembangkan cara pandang tentang Palestina-Israel dalam bentuk bahasa, simbol dan ritual serta mengembangkan stereotip positif mengenai Palestina-Israel (Locker-Biletzki, 2013).

NLL membedakan gerakan Zionis dan komunitas Yahudi. Mereka menganggap Zionisme sebagai representasi dari kolonialisme, sementara komunitas Yahudi Komunis sebagai gerakan reaksioner yang bisa bekerja sama dengan orang Arab. NLL mengutarakan bahwa Palestina memperbolehkan masyarakatnya untuk berpartisipasi secara setara dengan etnis lain dengan konsep Arab adalah mayoritas tetapi negara akan demokratis dengan cara memberikan hak kepada anggota dari semua etnis (Greenstein, 2013). Konsep yang diusung oleh NLL ini jelas berbeda dengan PKP yang sepenuhnya mendukung perjuangan orang Arab secara total.

Simpulan

Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa PKP benar-benar berada di tengah posisi yang amat tidak menguntungkan. Sulit bagi PKP untuk menerapkan ideologi komunis yang bersifat internasional tetapi harus berseteru dengan kepentingan politik identitas Arab dan Yahudi di PKP hingga menyebabkan keduanya kerap terlibat konflik internal yang menyebabkan dualisme dalam tubuh PKP. Usaha yang dilakukan PKP sebagai wadah titik temu antara orang Yahudi dan Arab dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan Zionisme akhirnya berujung pada kegagalan yang disebabkan oleh kebijakan internal partai yaitu Arabisasi dan kebijakan eksternal yang dibuat oleh Inggris yaitu White Paper 1939. Hingga pada akhirnya PKP mulai retak yang diiringi dengan banyaknya petinggi PKP dari kalangan Yahudi yang keluar untuk kemudian membentuk partai komunis baru.

Selain itu di sisi lain, gerakan komunisme tidak mendapatkan atensi yang besar bagi umat Islam di Palestina karena umat Islam Palestina tetap memegang teguh eksistensi tradisi awal ajaran Islam mengenai keadilan sosial dan semangat melawan penindasan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu mayoritas umat Islam Palestina tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan gerakan komunis. Selain

itu bisa dilihat pula bahwa kebanyakan orang Arab yang bergabung dengan PKP adalah Arab Palestina yang menganut Kristen Ortodoks.

Daftar Pustaka

- Akher, R. el. (1939). *Reply of Arab Higher Committe fo Palestine to the White Paper Issued by The British Government*. [online] Library of Congress. Dalam: <https://www.loc.gov/rr/amed/pdf/palestine1/Reply-of-the-Arab-Higher-Commitee-White-Paper.pdf> [Diakses 2 Maret 2023]
- Apter, L. E. (2008). *Disorderly decolonization: the White Paper of 1939 and the end of British rule in Palestine*. [online] The University of Texas at Austin. Dalam: <https://www.proquest.com/openview/99eb9c031466b5a64ac0b956096f7004/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750> [Diakses 4 Maret 2023]
- Armstrong, K. (2013). *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, terj. T. Hermaya. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ayyad, A. A. (1999). *Arab nationalism and the Palestinians, 1850-1939*. [online] PASSIA. Dalam: <https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/3871/3/Arab-Nationalism.pdf> [Diakses 6 Juni 2022]
- Beinen, J. (1977). The Palestine Communist Party 1919 - 1948. *MERIP Reports*, [online] 55, 3-17 Dalam: <https://doi.org/10.2307/3010830> [Diakses 10 April 2022]
- Budeiri, M. (1977). *The Palestine Communist Party, its Arabisation and the Arab Jewish Conflict in Palestine, 1929-1948*. [online] London School of Economics and Political Science. Dalam: <https://etheses.lse.ac.uk/3571/> [Diakses 10 Maret 2022]
- Budeiri, M. (2012). *Reflections on a Silenced History: The PCP and Internationalism*. [online] Marxists Internet Archive. Dalam: <https://www.marxists.org/subject/jewish/pcp-silence.pdf> [Diakses 5 Mei 2023]
- CIA. (1947). *Soviet Penetration in Palestine*. [online] Dalam: <https://www.documentcloud.org/documents/23045317-soviet-penetration-in-palestine> [Diakses 20 Juli 2023]
- DeBoard, R. B. (2013). *Policing Palestine: British security strategy in Palestine, 1917-1947*. [online] Beardocs. Dalam: <https://baylor-ir.tdl.org/items/8f9fc6b5-05b3-4ddf-b0eb-9dd8c4bcdd5b> [Diakses 10 Juni 2023]
- Ebon, M. (1948). Communist tactics in Palestine. *Middle East Journal*, [online] 2(3), 255–269. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/4321987> [Diakses 15 Mei 2023]
- Fineman, H. (1918). *Poale Zionism, and Outline of Its Aims and Institutions*. [online]

- Marxist Internet Archive. Dalam: <https://www.marxists.org/subject/jewish/poale-zion-18.pdf> [Diakses 10 Mei 2023]
- Franzen, J. (2007). Communism versus Zionism: The Comintern, Yishuvism, and the Palestine Communist Party. *Journal of Palestine Studies*, [online] 36(2), 6-24. Dalam: <https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/36/2/6/53844/Communism-versus-Zionism-The-Comintern-Yishuvism> [Diakses 5 Mei 2023]
- Fraser, R. (2014). *The TUC and the Histadrut, 1945-1982: a problematic relationship*. [online] Royal Holloway, University of London. Dalam: https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/22728404/The_TUC_and_the_Histadrut_1945_1982_a_problematic_relationship_final.2.pdf [Diakses 25 Mei 2023]
- Greenstein, R. (2009). Class, nation, and political organization: The anti-zionist left in Israel/palestine. *International Labor and Working-Class History*, [online] 75(1), 85-108. Dalam: <https://doi.org/10.1017/S0147547909000076> [Diakses 5 Juni 2023]
- Greenstein, R. (2011). A Palestinian Revolutionary: Jabra Nicola and the Radical Left. *Jerusalem Quarterly*, [online] 46, 32-48. Dalam: <https://www.proquest.com/openview/2cb1d496af097f5941078e581dd79c25/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616497> [Diakses 16 Juni 2023]
- Greenstein, R. (2013). *The Palestinian National Movement and the Anti-Colonial Struggle*. [online] Wits Institute for Social and Economic Research. Dalam: <https://wiser.wits.ac.za/system/files/seminar/Greenstein2013.pdf> [Diakses 5 Mei 2023]
- Guelke, A. (2003). *British counterinsurgency: From Palestine to Northern Ireland*. Frank Cass Co Ltd Newbury House, 900 Eastern Ave, Newbury Park, Ilford.
- Halliday, F. (1978). Early Communism in Palestine. *Journal of Palestine Studies*, [online] 7(2), 162-169. Dalam: <https://doi.org/10.1525/jps.1978.7.2.00p0040w> [Diakses 23 Mei 2023]
- Halperin, L. (2015). Origins and Evolution of Zionism. *Philadelphia: Foreign Policy Research Institute*. [online] FPRI. Dalam: https://www.fpri.org/docs/halperin_-_hi_-_origins_and_evolution_of_zionism.pdf [Diakses 10 Juni 2023]
- Halpern, B., & Reinharz, J. (1988). Nationalism and Jewish socialism: the early years. *Modern Judaism*, [online] 8(3), 217-248. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/1396067> [Diakses 6 Mei 2023]
- Hatuqa, Dalia. (2023). The Nakba: Five Palestinian Towns Massacred 75 Years Ago. *Aljazeera*, [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/15/the->

- nakba-five-palestinian-towns-massacred-75-years-ago [Diakses 20 Desember 2023]
- Heller, J. (2003). *The Birth of Israel, 1945-1949 : Ben-Gurion and His Critics*. [online] University Press of Florida. Dalam: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273279930240> [Diakses 22 Mei 2023]
- Heyes, C. (2012). Identity Politics (Stanford Encyclopedia of Philosophy). [online] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam: <https://philpapers.org/rec/HEYIP> [Diakses 10 Mei 2023]
- Kessler, M. (2014). Joseph Berger: Communist Activist in Palestine and Victim of Stalinism (1904–1978). *Moving the Social*, [online] 51, 159–178. Dalam: <https://moving-the-social.ub.rub.de/index.php/MTS/article/view/7494> [Diakses 10 Juni 2023]
- Kirasirova, M. (2016). *Arabization, Purges, And Terror In The Kuv Arab Circle*. [online] Boston University. Dalam: <https://www.bu.edu/wll/masha-kirasirova/> [Diakses 18 Juli 2023]
- Lehn, W. (1974). The Jewish National Fund. *Journal of Palestine Studies*, [online] 3(4), 74-96. Dalam: <https://doi.org/10.2307/2535450> [Diakses 20 Juli 2023]
- Lenin, V. I. (1920). *Komunisme "Sayap Kiri" Suatu Penyakit Kanak-Kanak*. [online] Marxists Internet Archive. Dalam: <https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1920/KomunismeSayapKiri/Ke-terangan.htm> [Diakses 20 Juli 2023]
- Locker-Biletzki, A. (2013). *Jewish-Arab Fraternity: Language, Symbol and Ritual in the Israeli Communist Party, 1948–1965*. [online] University of Toronto. Dalam: <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/91308> [Diakses 5 Juli 2023]
- Locker-Biletzki, A. (2015). Judaism and communism: Hanukkah, Passover, and the Jewish Communists in Mandate Palestine and Israel, 1919–1965. *Journal of Israeli History*, [online] 34(2), 141–158. Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531042.2015.1068971> [Diakses 10 Juni 2023]
- Locker-Biletzki, A. (2018). Colonialism and imperialism in Communist thinking in Palestine/Israel, 1919–1965. *Settler Colonial Studies*, [online] 8(3), 384–399. Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2017.1324265> [Diakses 8 Juli 2023]
- Mack, M. (2015). Orthodox and communist: a history of a Christian community in mandate Palestine and Israel. *British Journal of Middle Eastern Studies*, [online] 42(4), 384–400. Dalam:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2014.1002386>
[Diakses 15 Juli 2023]

- Magnis, S. F. (2017). *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Mansfield, P. (2003). *A History of Middle East*. (Revised by Nicolas Pelham). England: Penguin Books.
- Marxists Internet Archive. (1868). Chapter *Five Conflicting Elements in The International*. [online] Dalam: <https://www.marxists.org/archive/steklov/history-first-international/index.htm> [Diakses 10 Mei 2022]
- Marxist Internet Archive. (1891). *The Second International*. [online] Dalam: <https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/index.htm> [Diakses 14 Juni 2023]
- Perlmutter, A. (1969). Dov Ber–Borochoy: A Marxist–Zionist Ideologist. *Middle Eastern Studies*, [online] 5(1), 32-43. Dalam: <https://doi.org/10.1080/00263206908700117> [Diakses 20 Juli 2023]
- Rubenstein, S. M. (2019). *The Communist Movement in Palestine and Israel, 1919-1984*. [online] Routledge. Dalam: <https://bit.ly/3NJNRhk> [Diakses 10 Juli 2023]
- Saleh, M. M. (2002). *Palestina: sejarah, perkembangan dan konspirasi*. Depok: Gema Insani.
- Sargent, A. (1980). *The British Labour Party and Palestine 1917-1949*. [online] University of Nottingham. Dalam: <https://eprints.nottingham.ac.uk/11289/> [Diakses 5 Juni 2023]
- Secretariat, E. P. (1929). *Resolution on the Insurrection Movement in Arabistan*. [online] Dalam: http://ml-review.ca/aml/Comintern/Comintern_Palestine.htm [Diakses 15 Juli 2023]
- Shariati, A. (1997). *Islamology The Basic Design for a School of Thought and Action*. [online] Shariati. Dalam: <http://www.shariati.com/english/islam/islam4.html> [Diakses 18 Juli 2023]
- Sprague, T. (2011). *Meneruskan Nyala Api Internasional: Sejarah Internasional Keempat*. [online] Revolusioner. Dalam: <https://www.revolusioner.org/teori-4/trotsky/8251-meneruskan-nyala-api-internasional-sejarah-internasional-keempat.html> [Diakses 20 Juli 2023]
- Steppenbacker, J. (2009). *The Palestine Communist Party from 1919-1939: A study of the subaltern centers of power in Mandate Palestine*. [online] The Ohio State University. Dalam:

https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1253563737 [Diakses 20 Juli 2023]

Suseno, F. M. (2013). *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

The Avalon Project. (2008). *British White Paper of 1939*. [online] Yale Law School. Dalam: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp [Diakses 18 Juli 2023]

Weizmann, C. (1939). *The Jewish Case Against the Palestine White Paper*. [online] The Jews Agency For Palestine. Dalam: https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/THE JEWISH CASE AGAINST THE PALESTINE WHITE PAPER JUNE, 1939.pdf [Diakses 17 Juli 2023]

Yassour, A. (1986). Philosophy - Religion - Politics: Borochoy, Bogdanov and Lunacharsky. *Studies in Soviet Thought*, [online] 31(3), 199-230. Dalam: <https://doi.org/10.1007/BF01044978> [Diakses 19 Juli 2023]